

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta

Marlela Wati<sup>1</sup>, Fajar Satriya Segarawasesa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: marlelawati02@gmail.com<sup>1</sup>, fajarsatriyas@unisayogya.ac.id<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 17 Juni 2023

Revised: 25 Juni 2023

Accepted: 26 Juni 2023

**Keywords:** *Quality of Financial Reports, Regional Financial Accounting System, Utilization of Information Technology, Competence of Human Resources, Internal Control System.*

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of the Regional Financial Accounting System, Utilization of Information Technology, Human Resource Competence, and Internal Control System on the quality of the local government's financial statements in Sleman Regency. This research was quantitative research. The population of this research was structural officials at the Regional Government Work Unit of Sleman Regency, DIY. The sampling was done by employing purposive sampling. Data collection was carried out by distributing questionnaires to the Regional Government Work Unit employees of Sleman Regency. The data that has been collected was processed using SPSS 20. The statistical method used to test the hypothesis was multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing indicate that the Regional Financial Accounting System and Utilization of Information Technology have a positive effect on the quality of local government financial reports, while Human Resource Competence and Internal Control Systems have no effect on the quality of local government financial reports.*

### PENDAHULUAN

Masyarakat di setiap daerah pasti menginginkan pemerintahan yang baik. Sehingga pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan sudah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah daerah wajib menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberikan informasi (Mustikawati & Segarawasesa, 2023). Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2010 yaitu: 1) Relevan yang artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. 2) Andal yang artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. 3) Dapat dibandingkan yang artinya laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau

pembanidng kinerja organisasi lain yang sejenis. 4) Dapat dipahami artinya laporan keuangan yang disajikan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mengandung informasi yang bernilai, karena informasi dalam laporan keuangan tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan (Safitri & Fathah, 2018). Suwardjono (2016) dalam (Pirani et al., 2023) informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Sitorus, 2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penilaian tersebut berupa opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Semester I Tahun 2021, BPK memeriksa 541 LKPD Tahun 2020 dari 542 Pemda. Satu Pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2020 (*anuadited*) kepada BPK untuk diperiksa yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. BPK memberikan 486 opini WTP (90%), 49 opini WDP (9%), 4 opini TMP (0,7%), dan 3 opini TW atau tidak wajar (0,3%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, 33 dari 34 (97%) Laporan Keuangan pemerintah provinsi memperoleh opini WTP, 365 dari 415 (88%) LK pemerintah kabupaten memperoleh WTP, dan 88 dari 93 (95%) LK pemerintah kota memperoleh opini WTP. Dari jumlah tersebut diketahui terdapat LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Secara umum, permasalahan penyajian laporan keuangan terjadi antara lain pada akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2021 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun sudah 11 kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan. Salah satu permasalahan yang ditemukan oleh BPK adalah belum tepatnya pengelolaan aset tetap. Hal ini membutuhkan bahwa adanya keseriusan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan amanah kepada pihak lain (agen) untuk menjalankan semua kegiatan atas nama prinsipal.

Mardiasmo (2004) dalam (Riandani, 2019) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik

sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Di dalam pelaporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) berkewajiban untuk menyajikan segala informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi keuangan pemerintah yang dimana bertindak sebagai prinsipal untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dan baik secara langsung atau tidaklangsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antar pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Mulyati et al., 2023).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Ikatan Akuntansi Indonesia 2015) mengatakan bahwa Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi laporan keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (Fathah, 2017).

Menurut (Pirani et al., 2023) definisi laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh lembaga negara yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan laporan keuangan pemerintah daerah akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas bagi semua penggunanya jika di dalam laporan keuangan tersebut memiliki nilai informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan karakteristik laporan keuangan pemerintah yaitu: a) Relevan, b) Andal, c) Dapat Dibandingkan, d) Dapat Dipahami

### **Sistem Akuntansi**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Rifandi, 2018).

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun

---

2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/ kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan (Mulyati et al., 2023).

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pengguna, karena laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. (Barus, 2017). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komperhensif sehingga bisa memperbaiki kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Mulyati et al., 2023) menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H1; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang yang menyusun laporan keuangan adalah orang yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi dan telah menguasai Standar Akuntansi Pemerintah.

Tjiptoherijanto (Alimbudioni & Fidelis, 2004) untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan, karena deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien (Binawati, 2022).

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, perkembangan teknologi pun semakin memingkat dan akan memudahkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan suatu organisasi (Rifandi, 2018).

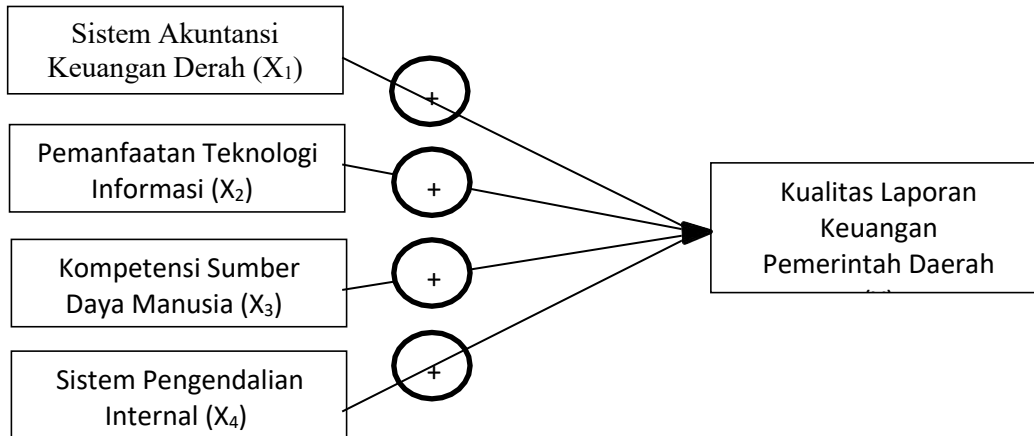
Laudon (Ningrum, 2018) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. “Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan *hardware*, *software*, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi”.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaran untuk memberkan jaminan atau keyakinan

yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan-perundang-undangan (Mahmudi, 2016).

Suatu sistem pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk, maka dari itu pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik.



Gambar 1 Bagan Kerangka Berfikir

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer. Penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2016). Tempat yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, D.I.Y. Populasi pada penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, DIY. Jumlah SKPD di Kabupaten Sleman sebanyak 48 SKPD, yang terdiri dari 26 kedinasan dan 22 non kedinasan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 SKPD kedinasan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Pendapat responden diukur menggunakan skala *likert* 5 point dari skor 1 sampai 5. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang berupa kuesioner yang dikumpulkan sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022. Adapun kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner, dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 98 kuesioner, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2 kuesioner, kuesioner yang dapat diolah berjumlah 87 kuesioner dan kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 11 kuesioner. Gambar mengenai data sampel ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Pengisian Kuesioner**

No	Keterangan Kuesioner	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	100	100%
2	Kuesioner yang kembali	98	98%
3	Kuesioner yang tidak kembali	2	2%
4	Kuesioner yang dapat diolah	87	87%
5	Kuesioner yang tidak dapat diolah	11	11%

Sumber: diolah data primer tahun 2022

### Hasil Analisis Statistik Diskriptif

Analisis statistik diskriptif digunakan untuk menunjukkan gambaran dari variabel penelitian. Gambaran tersebut berupa nilai dari rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel (Barokah & Segarawasesa, 2023).

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minium	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	87	12	40	33.84	4.063
Pemanfaatan Teknologi Informasi	87	18	25	22.07	2.281
Kompetensi Sumebr Daya Manusia	87	22	40	32.06	4.252
Sistem Pengendalian Internal	87	29	45	37.99	4.059
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	87	29	60	50.90	5.555
Valid N (listwise)	87				

Sumber: data primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan hasil analisis diskriptif pada tabel 2 dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai minimum 12, nilai maximum 40 dengan nilai *mean* 33.84 dan standar deviasi sebesar 4.063. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa keragaman variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang dikumpulkan masih relatif rendah.
- b. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai minimum 18, nilai maximum 25 dengan nilai *mean* 21.07 dan satandar deviasi 2.281. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa keragaman variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dikumpulkan masih

relatif rendah.

- c. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum 22, nilai maximum 40 dengan nilai *mean* 32.06 dan standar deviasi 4.252. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa keragaman variabel kompetensi sumber daya manusia yang dikumpulkan masih relatif rendah.
- d. Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai minimum 29, nilai maximum 45 dengan nilai *mean* 37.99 dan standar deviasi 4.059. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa keragaman variabel sistem pengendalian internal yang dikumpulkan masih relatif rendah.
- e. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum 29, nilai maximum 60 dengan nilai *mean* 50.90 dan nilai standar deviasi sebesar 5.555. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa keragaman kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih relatif rendah.

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Data penelitian yang terkumpul diolah menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 20. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item pertanyaan dinyatakan valid.  $R_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0.2084

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
<b>Kualitas Laporan Keuangan</b>			
1	0.815	0.2084	Valid
2	0.783	0.2084	Valid
3	0.643	0.2084	Valid
4	0.770	0.2084	Valid
5	0.711	0.2084	Valid
6	0.842	0.2084	Valid
7	0.794	0.2084	Valid
8	0.857	0.2084	Valid
9	0.837	0.2084	Valid
10	0,846	0.2084	Valid
11	0.750	0.2084	Valid
12	0,725	0.2084	Valid

<b>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</b>			
1	0.864	0.2084	Valid
2	0.892	0.2084	Valid
3	0.919	0.2084	Valid
4	0.807	0.2084	Valid
5	0.671	0.2084	Valid
6	0.839	0.2084	Valid
7	0.909	0.2084	Valid
8	0.896	0.2084	Valid
<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>			
1	0.910	0.2084	Valid
2	0.872	0.2084	Valid
3	0.833	0.2084	Valid
4	0.927	0.2084	Valid
5	0.872	0.2084	Valid
<b>Kompetensi Sumber Daya Manusia</b>			
1	0.796	0.2084	Valid
2	0.752	0.2084	Valid
3	0.689	0.2084	Valid
4	0.783	0.2084	Valid
5	0.846	0.2084	Valid
6	0.814	0.2084	Valid
7	0.801	0.2084	Valid
8	0.766	0.2084	Valid
<b>Sistem Pengendalian Internal</b>			



1	0.855	0.2084	Valid
2	0.850	0.2084	Valid
3	0.811	0.2084	Valid
4	0.885	0.2084	Valid
5	0.789	0.2084	Valid
6	0.822	0.2084	Valid
7	0.811	0.2084	Valid
8	0.837	0.2084	Valid
9	0.828	0.2084	Valid

Sumber: data primer yang diolah 2022.

Berdasarkan tabel 4 telah dilakukan pengujian dengan membandingkan antara  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$  dari masing-masing item pertanyaan. Pengujian yang dilakukan menunjukkan  $r_{hitung}$  dari masing-masing item pernyataan diatas 0,2084 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner untuk kelima variabel dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan reliabel atau tidak, maksud dari reliabel adalah jika indicator atau kuesioner tersebut diujikan berulang-ulang maka menunjukkan hasil yang sama. Variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dan tidak reliabel jika *Cronbach Alpha* < 0,70.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sistem Akuntansi keuangan Daerah	0.945	0.70	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.926	0.70	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.906	0.70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.943	0.70	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.938	0.70	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 5 pengujian reliabilitas yang dilakukan pada semua item pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil bahwa semua item pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada kuesioner yang digunakan dikatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil analisis data pada penelitian ini

terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. Salah satu uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic *Kolmogorov Smirnov (KS)*. Untuk mengetahui data terdistribusi normal adalah dengan melihat nilai signifikan residual hasil regresi dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikan  $>0,05$  maka data terdistribusi normal.

dan jika nilai signifikan  $<0,05$  maka data tidak terdistribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.066

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0.066 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan uji multikolinieritas.

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi atau tidak antar varianbel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (bebsa dari multikolonearitas). Multikolonieritas dapat dilihat dari VIF (*Varians Inflation Factor*) dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai VIF  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0.10$  maka tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Jika nilai VIF  $>10$  dan nilai *tolerance*  $<0,10$  maka terjadi gejala multikolinieritas.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model			Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	Sistem Akuntansi	Keuangan	0.526	1.903
	Daerah			
	Pemanfaatan Teknologi	Informasi	0.417	2.396
	Kompetensi Sumber Daya	Manusia	0.503	1.987

	Sistem Pengendalian Internal	0.336	2.977
--	------------------------------	-------	-------

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20, 2022

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 yang berarti bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mengetahui apakah data memiliki varian yang sama (homokedastisitas) atau tidak heretoskedastisitas adalah dengan melihat nilai signifikan dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika nilai signifikan dari variabel bebas < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Sig.
	(Constant)	0.437
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.865
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.098
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.654
	Sistem Pengendalian Internal	0.272

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 20, 2022

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0.865, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikan sebesar 0.098, kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan sebesar 0.654, dan sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikan sebesar 0.272 yang berarti semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan arah pengaruh apakah positif atau negatif. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikan < 0.05 maka variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dinyatakan sebagai berikut: Model persamaan yang digunakan adalah menurut Sugiyono (2014) sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji T**

<b>Model</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
(Constant)	1.280	0.204
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	13.630	0.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.506	0.014
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.236	0.814
Sistem Pengendalian Internal	0.649	0.518

Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan

## **Pembahasan**

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Perpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang mana sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1.022 dan nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Darwanis., 2018); (Sitorus, 2019); (Nugraha, 2019) dan (Mulyati et al., 2023) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini secara teori sudah sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa pihak pemegang amanah (*agent*) atau pihak yang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara tepat sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada *principal* atau pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Semakin tinggi tingkat sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Sleman telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini secara teori sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang mana pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang mana

pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.304 dan nilai signifikan sebesar 0.025 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Barus, 2017), (Rifandi, 2018), (Ardianto & Eforis, 2019) (Binawati & Nindyaningsih, 2022); yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik tentu saja akan memberikan banyak keunggulan seperti kecepatan dalam pemrosesan data, meminimalisir terjadinya kesalahan dan biaya pemrosesan lebih rendah serta mempermudah penyusunan laporan keuangan sehingga lebih cepat dan tepat. Hal tersebut turut mempercepat kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu semakin baik pemanfaatan teknologi informasi disuatu daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan yang akan di sampaikan kepada pemeberi amanah. Hal ini menunjukkan bahwa sub bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sleman telah melakukan pengolahan data transaksi keuangan dengan menggunakan *software* yang sesuai dengan perundang-undangan

Secara teori hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan bahwa pihak pemegang amanah (*agent*) telah memanfaatkan teknologi informasi sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada *principal*. Hasil penelitiann ini juga sejalan dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi kepada pelayanan publik.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang mana kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0.045 dan nilai signifikan sebesar 0.510 lebih besar dari 0.05.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi dikarenakan sumber daya manusia pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sleman tidak semuanya lulusan bidang akuntansi. Diketahui bahwa pegawai di bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sleman yang lulusan bidang akuntansi berjumlah 33 dari 87. Hal ini berarti hanya sebanyak 38% yang lulusan dari bidang akuntansi sisanya 62% dari bidang selain akuntansi. Selain itu sumber daya manusia yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya pelatihan tentang profesi yang di ikuti oleh pegawai di bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sleman. Berdasarkan data responden, lebih dari 50% masa kerja pegawai di bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sleman adalah lebih dari 10 tahun (45 orang). Walaupun kebanyakan dari pegawai di bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sleman memiliki masa kerja yang lama (lebih dari 10 tahun ), pelatihan yang pernah di ikuti oleh pegawai tentang profesi masih terhitung sedikit.

Diketahui bahwa dari 87 responden, yang pernah mengikuti pelatihan lebih dari 5 kali hanya 13 orang, sedangkan yang mengikuti pelatihan selama 1-2 kali memiliki skor paling banyak yaitu 44 orang dan bahkan yang tidak pernah mengikuti pelatihan berjumlah 21 orang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang mana akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Seharusnya sesuai dengan teori semakin baik kompetensi sumber daya manusia seorang pegawai (*agent*) maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil uji t sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang mana sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0.120 dan nilai signifikan sebesar 0.146 lebih besar dari 0.05.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penjelasan dalam lampiran 1 Pemendagri No. 4 Tahun 2008, bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internalnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara Sistem Pengendalian Internal yang baik dalam rangka meningkatkan keadaan informasi keuangan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Seharusnya sesuai dengan teori jika sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik dan maksimal maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengendalian internal pada SKPD Kabupaten Sleman. Sistem pengendalian internal yang diterapkan sudah baik, namun belum dijalankan secara efektif dan efisien menyebabkan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan kurang tepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianto & Eforis, 2019);(Pratama & Segarawasesa, 2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara teori hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang mana akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Seharusnya sesuai dengan teori semakin baik kompetensi sumber daya manusia seorang pegawai (*agent*) maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
3. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah metode survey dengan wawancara langsung agar tidak terjadi salah persepsi dan agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu peneliti berikutnya juga dapat membahas variabel lain yang belum dijadikan variabel pada penelitian ini dan juga memperluas cakupan wilayah penelitian serta memperbanyak responden.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Barokah, S., & Segarawasesa, F. S. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNET FINANCIAL REPORTING ( Studi pada RSUD di Pulau Jawa Periode 2019 – 2020 ). *Jurnal Tambora*, 7(1), 282–290.
- Barus, S. (2017). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Dengan Sistem Pengendalian Internal. In *Universitas Sumatera Utara*.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klat. *Optimal*, 19(1), 19–39.
- Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 9–19.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mulyati, E., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7). <https://doi.org/10.36448/jak.v10i1.1207>
- Mustikawati, M., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis penerapan good governance pada pengelolaan dana desa di kalurahan sidomoyo. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 4(5), 76–88.
- Ningrum, K. K. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. *E-Journal UAJY*, 39–54.
- Nugraha, R. F. J. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sleman) THE*.
- Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar , Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *J-CEKI : Jurnal Cendeki Ilmiah*, 2(6), 485–497.
- Pratama, M. A. S., & Segarawasesa, F. S. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PUSKESMAS DI KOTA YOGYAKARTA. *Maneksi*, 12(1), 58–70.
- Riandani, R. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota ). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3–28. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- Rifandi, M. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 14(2), 48–61. <https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.263>
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Sitorus, F. M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasis Pada SKPD Kota Tanjungbalai). *Jurnal Stie Semarang*, 7(3), 51–63.